TRANSFORMASI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK, OMBUDSMAN BENGKULU LAKUKAN SOSIALISASI OPINI OMBUDSMAN

Kamis, 18 Juni 2026 - bengkulu

LEBONG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lebong atas komitmen kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Swarang Patang Stumang pada Rabu (18/6/2026) ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menyambut transformasi besar dalam sistem penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti yang hadir sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa penilaian tahun 2026 ini merupakan transformasi dari metode sebelumnya. Kini penilaian tidak lagi sekadar berfokus pada pemenuhan 14 komponen standar pelayanan, tetapi mencakup empat dimensi utama, antara lain input, proses, output, dan pengaduan, serta mengukur tingkat kepercayaan masyarakat. "Kami dalam penilaian tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga harus melihat bukti nyata di lapangan dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan," tegas Mustari Tasti.

Transformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi yang mungkin masih terjadi meskipun secara administratif pelayanan dinilai baik. "Pelayanan yang tampak baik secara administratif belum tentu bebas dari maladministrasi.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Bengkulu, Hendra Irawan memaparkan bahwa penilaian akan menyasar sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses penilaian lapangan dijadwalkan berlangsung pada Juli–Agustus 2026.

"Kami mendorong perbaikan pelayanan publik, dan dinas yang akan dinilai adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD, dan Dinas PU. Untuk itu, kami meminta agar bagian Ortala mendampingi kesiapan dalam Opini Ombudsman," ujar Hendra Irawan.

Asisten I Setda Kabupaten Lebong, Reko Haryanto yang hadir mewakili Bupati Lebong menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan mengajak seluruh peserta untuk bersikap serius. Ia menyoroti bahwa Lebong pernah meraih prestasi luar biasa dalam pelayanan publik pada penilaian sebelumnya. "Ke depannya, kita berharap hasil dari Opini Ombudsman RI mendapatkan hasil terbaik. Saya mengajak seluruh peserta agar serius dan mempersiapkan diri, tidak hanya terbatas pada OPD yang dinilai saja, tetapi seluruhnya harus siap. Mohon tindakan nyata untuk seluruh peserta agar mampu melayani dengan baik," pesan Reko Haryanto.

Harapan untuk meraih predikat tertinggi juga disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Lebong, Hendra Eka Saputra, dalam laporannya.

"Kami berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman terkait pelayanan publik serta mempersiapkan diri menghadapi penilaian Ombudsman," ujarnya.

Salah satu peserta, Kabid Penjamin Mutu RSUD Lebong, menyambut positif penilaian ini sebagai ajang introspeksi. "Kami berharap dinilai agar mengetahui persepsi masyarakat untuk introspeksi diri dan mengubah SOP agar lebih baik lagi," ungkapnya dalam sesi tanya jawab.

Dengan digelarnya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Lebong berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian pelayanan publik, sekaligus menjawab tantangan baru dari sistem penilaian Ombudsman yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.